

LANGGAR PPKM LEVEL 3

Hajatan dengan Jatilan Dibubarkan

WONOSARI (KR) - Akibat melanggar aturan PPKM Level 3 sebuah kegiatan hajatan salah satu warga di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari. Gelaran hajatan dengan hiburan jathilan dibubarkan petugas.

Panewu Gedangsari, Djarot Hadiatmojo menyatakan pembubaran dilakukan karena dalam hajatan tersebut dengan mendatangkan hiburan jathilan yang menimbulkan kerumunan. "Ada warga kami yang menggelar hajatan khitanan dan ternyata dalam acara tersebut ada tambahan hiburan jathilan outdoor yang menyebabkan kerumunan," katanya Jumat (11/2).

Dari temuan pelanggaran tersebut Satgas bersama petugas lainnya datang ke lokasi untuk memberi edukasi dan meminta agar jathilan dibubarkan. Sementara untuk kegiatan hajatan diberikan kelonggaran dengan tetap menerima tamu sesuai ketentuan PPLM Level 3.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, warga yang hendak menyelenggarakan hajatan wajib mendapat izin dan rekomendasi dari Satgas Kalurahan maupun Kapanewon. Terdapat kesanggupan tidak menerapkan

prasanman, pembatasan tamu dan penerapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Bupati Gunungkidul nomor 443/0777 tentang PPKM Level 3. Di antaranya menyebutkan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat. "Kegiatan secara disiplin menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat," imbuhnya.

Dalam setiap kegiatan wajib menaati ketentuan yakni mendapat rekomendasi Satgas Covid-19 dan dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

Untuk seluruh warga, mengingat kasus covid19 saat ini melonjak lagi dan DIY kembali ke PPKM level 3, maka untuk warga diminta membatasi kegiatan yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan kerumunan. "Terutama hajatan selalu jaga prokes dengan selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak," terangnya. (Bmp)

PENGURANGAN WAKTU PEMBELAJARAN

17 Siswa dan 1 Tenaga Pendidik Terkonfirmasi Covid

WATES (KR) - Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Kulonprogo jumlah siswa yang terkonfirmasi virus Covid-19 terus bertambah.

Sampai pertengahan Februari ini, gugus tugas mencatat ada delapan belas kasus penularan, yakni 17 siswa dan satu tenaga pendidik yang diketahui berasal dari program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Kedelapan belas kasus penularan virus Covid-19 itu tersebar di delapan sekolah, tujuh diantaranya merupakan jenjang pendidikan SLTA dan satu dari

SLTP.

Kasus penularan di sektor pendidikan ditemukan gugus tugas dari kegiatan surveilans atau swab acak oleh Dinas Kesehatan.

"Hingga saat ini gugus tugas melakukan swab acak pada sekitar 116 siswa dari total 2.337 sasaran surveilans, atau lima persen dari total sasaran yang tersebar di 61 sekolah. Sekolah yang terjadi kasus penularan sekarang sudah dihentikan

PTM-nya atau sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh," ujar drg Bani Rahayujati MKes Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo kepada wartawan via daring, Kamis (10/2) sore

Terhadap meningkatkan kasus penularan di sekolah ini, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo Arif Prastowo SSos MSi, dalam pelaksanaan PTM pada tiap sekolah kini dibatasi maksimal 20 anak. Dilakukan pula pengurangan terhadap waktu pembelajaran bagi siswa dan guru yang dibatasi tidak boleh

lebih dari enam jam mata pelajaran.

"Sekolah yang fasilitasnya belum mendukung untuk menjalankan kebijakan itu, kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah agar melakukan PTM secara shifting terhadap para siswanya.

Adanya aturan ini sekolah dipersilahkan pula untuk mengatur durasi jam pelajaran sesuai dengan ketersediaan guru dan kapasitas sekolah. Ini penting dilakukan agar guru tidak mengalami kelelahan ketika mengajar dalam dua shift," ucap Arif. (Wid)

FKUB KULONPROGO

Sesalkan Sikap Biro Hukum Sekda DIY



KR-Asrul Sani

FKUB Kulonprogo menggelar FGD menanggapi sikap Biro Hukum Sekda DIY.

WATES (KR) - Sikap Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) DIY yang menolak Perda Nomor 6/2021 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan yang telah disepakati DPRD Kulonprogo sangat disayangkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kulonprogo.

Menurut Ketua FKUB Kulonprogo Agung Mabruki, penolakan terhadap perda

yang telah disetujui oleh Dewan Kulonprogo oleh Pemda DIY tidak melalui proses konsultasi maupun komunikasi dengan DPRD Kulonprogo maupun kepada FKUB Kulonprogo.

"Padahal perda tersebut merupakan langkah preventif dalam menjaga warga Kulonprogo yang semakin maju dan modern. Tapi justru mendapat penolakan dari Biro Hukum

Setda DIY," katanya.

FKUB akan mengambil langkah-langkah agar perda tersebut disetujui, salah satunya menggelar forum group discussion (FGD). Forum tersebut dinilai strategis dan solutif. "Kami mengadakan FGD menghadirkan Biro Hukum Setda DIY, Ketua DPRD Kulonprogo, Kemenag Kulonprogo dan Kabag Hukum Setda Kulonprogo," jelas Agung di sela FGD di Wisma Kusuma Hotel, Wates, Jumat (11/2).

Penolakan terhadap Perda tentang Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan yang dilakukan Biro Hukum Setda DIY ungunya dilatarbelakangi oleh aspek kewenangan.

Pemda DIY berdalih tidak punya kewenangan berkaitan dengan perda yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan kepercayaan. (Rul)

KPPD SOSIALISASI PAJAK RANMOR

Pelayanan Samsat Keliling Diperluas

WONOSARI (KR) - Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor (WP) di Kapanewon Girisubo dengan melibatkan para lurah dan pamong kalurahan. Kepala KPPD Gunungkidul M. Yuliyanto SIP MPA menyatakan dilibatkannya para lurah dan pamong desa ini diharapkan berdampak langsung terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Tahun ini PAD kami targetkan Rp 79 miliar," kata Kepala KPPD Gunungkidul M. Yuliyanto SIP MPA Jumat (11/2).

Diakuinya, kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di wilayahnya cukup tinggi sehingga



KR-Bambang Purwanto

Sosialisasi pajak ranmor di Kapanewon Girisubo.

meskipun dalam suasana Pandemi Covid-19 PAD yang ditentukan dapat melampaui target. Dengan membangun komunikasi langsung melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan para lurah desa diharapkan target yang ditetapkan tahun ini bisa tercapai. Selain menetap-

kan target PAD dari bea balik nama sebesar Rp 34.758.500,- hingga terkumpul target sebesar Rp 113.750

8.500,- "Kami optimis target untuk target tahun ini tercapai sesuai harapan," imbuhnya.

Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan

KPPD membuka pelayanan pembayaran tempat pembayar pajak ranmor di sejumlah tempat. Selain di Samsat induk di Wonosari, juga membuka layanan Samsat Desa Hargomulyo (Gedangsari), Samsat Desa Semugih (Rongkop), Samsat Desa Kampung (Ngawen), Samsat Desa Kemiri (Tanjungasi), Samsat Corner BPD Semin, Samsat Corner BPD Paliyan, Samsat Corner BPD Kapanewon Semin, Samsat Corner BPD Panggang, Samsat Corner BPD Karangmojo, E-Posti lokasi ATM Wonosari, Patuk dan Playen. "Selain itu kami juga melayani Samsat keliling di Sambipitu, Wonosari dan Sambipitu yang selalu dibanjiri wajib pajak," terangnya. (Bmp)

PANEN DI BUKIT WISATA TELETABIS

1 Hektare Hasilkan Rp 38 Juta

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta kembali memanen jagung Bukit Teletabis di Bulurejo, Monggol, Saptosari yang dikenal menjadi menjadi objek wisata dadakan, karena keindahan alamnya. Secara simbolis bupati ikut mendemonstrasikan alat pipil jagung bantuan pemerintah. Lokasi panen di Kelompok Tani (klontan) Sido Makmur memanen area seluas 25 hektar dari luas seluruhnya 68 hektar. Dari hasil ubinan tiap hektare menghasilkan 7,77 ton atau senilai Rp 30 juta lebih. "Jika sudah panen seluruhnya hasilnya bisa mencapai Rp 2 miliar lebih," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi SP MSi dalam laporannya, Jumat (11/2).



KR-Endar Widodo

Bupati Panen Jagung di Bukit Teletabis, Saptosari

Hadir dalam panen raya ini Bupati Gunungkidul H Sunaryanta, Ir Syam Arjanty MPA mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rismiyadi, SP M Siserta Bagian Daerah Hutan, PT Bisi International Tbk, Forkompink Saptosari dan para penyuluh BPP Saptosari.

Anggota Poktan Sido Makmur menyampaikan harapan kepada bupati perlunya bantuan alat mesin pertanian (alsinta) untuk mendukung program pertanian di wilayahnya. Pada kesempatan tersebut Ir Syam Arjanty MPA mengapresiasi kelompok yang telah berhasil membudidayakan jagung dengan provitas di atas rata-rata nasional. (Ewi)

PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI UMKM

Pemerintah Gandeng BPD dan PT Pos Indonesia

WONOSARI (KR) - Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Perindustrian Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (PKUT) Gunungkidul mengandeng pihak ketiga, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan PT Pos Indonesia. Beberapa waktu terakhir ini sudah melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha mikro kecil, antara lain perajin batu alam. Langkah pertama pemerintah akan menyatukan para perajin batu alam dari beberapa kalurahan untuk mendirikan koperasi bersama, Koperasi perajin Batu Alam. "Sementara BPD memberikan modal usaha lewat Kredit Usaha Rakyat



KR-Endar Widodo

Agus Nur Basuki SIP MM (KUR) yang bunganya rendah," kata Kabid UMKM Dinas (PKUT) Gunungkidul Agus Nur Basuki SIP MM, Jumat (11/2).

KUR Mikro BPD DIY adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan modal usaha kepada pengusaha yang bergerak di

sektor UMKM. Program tersebut menawarkan bunga yang sangat ringan, yaitu 6% flat per tahun. Menurutnya, besaran bunga ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan bunga produk pinjaman lain seperti KPR, KKB, KTA dan lain sebagainya. Untuk UMKM memberikan plafon maksimal hingga Rp 25 juta, jangka pembayaran maksimal 26 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk kredit investasi. Sementara PT Pos Indonesia menawarkan, jasa ekspedisi agar mampu meningkatkan penjualan dan turut memajukan Kabupaten Gunungkidul dengan mengenalkan produk-produk unggulannya ke daerah lain di Indonesia. (Ewi)

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.